

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi daerah dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta resiko ke depan di Kabupaten Enrekang berdasarkan sister-city yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang. Inflasi year-on-year(y-on-y) Kabupaten Sidenreng Rappang pada bulan April tahun 2025 sebesar 2,37 persen, inflasi month-to-month(m-to-m) sebesar 1,77 persen, dan , inflasi y-to-d Kabupaten Sidenreng Rappang April 2025 sebesar 2,26 persen. Pada bulan Mei 2025, inflasi year-on-year (Y-on-Y) tercatat sebesar 2,96 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 105,36. Dalam hal inflasi year-to-date (YTD), angkanya mencapai 1,97 persen, sedangkan untuk month-to-month (M-to-M) justru terjadi deflasi sebesar -0,27 persen. Andil inflasi year-on-year (Y-on-Y) terbesar berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan kontribusi sebesar 1,33 persen, diikuti oleh Kelompok Pakaian dan Alas Kaki, yang menyumbang 0,21 persen. Adapun kelompok lain seperti perumahan, transportasi, dan kesehatan memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap inflasi. Memasuki bulan Juni 2025, inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) menunjukkan kenaikan lebih lanjut menjadi 3,01%, menjadikannya angka inflasi tertinggi dalam satu tahun terakhir di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sementara secara keseluruhan, pada skala Month-to-Month (M-to-M), terjadi deflasi sebesar 0,09% untuk bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei. Deflasi ini menunjukkan adanya penurunan harga di beberapa sektor tertentu yang meredakan tekanan inflasi bulanan meskipun tingkat inflasi tahunan tetap meningkat.

Kelompok pengeluaran yang memiliki kontribusi terbesar terhadap inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) bulan Juni adalah: Makanan, Minuman, dan Rokok (1,29%), Perumahan, Listrik, Gas, dan Air (0,19%). Kelompok ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat menjadi komponen utama dalam kenaikan harga. Risiko inflasi ke depan pada Kabupaten Enrekang berasal dari fluktuasi harga komoditas pokok. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi antara lain cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng, dan beras. Berdasarkan tren Kabupaten Sidenreng Rappang, potensi kenaikan harga masih bisa terjadi apabila tidak ada intervensi dari pemerintah untuk mengelola pasokan dan distribusi secara optimal.

Selain inflasi, perkembangan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Enrekang juga menunjukkan tren yang perlu diawasi. Pada bulan Mei, Indeks Perubahan Harga (IPH) menunjukkan fluktuasi harga tinggi pada beberapa komoditas utama, termasuk cabai merah, cabai rawit, dan pisang.

Dalam analisis selama bulan April hingga Juni 2025, terjadi kenaikan inflasi tahunan yang signifikan, dengan Adanya deflasi sebesar -0,27 persen secara month-to-month (M-to-M) mengindikasikan penurunan harga beberapa komoditas tertentu, tetapi tetap harus diwaspadai kenaikan mendadak pada bulan-bulan selanjutnya, terutama saat mendekati puncak musim panen atau hari raya. angka Year-on-Year 3,01% pada bulan Juni menjadi yang tertinggi sepanjang periode April 2024 hingga Juni 2025. Sehingga Secara regional, tingkat inflasi 3,01% yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi sister-city Kabupaten Enrekang pada Juni 2025 merupakan yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Faktor utama pendorong inflasi selama bulan Mei dan Juni berasal dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan rokok, serta perumahan, listrik, gas, dan air. Meskipun terjadi deflasi secara bulanan di Juni, inflasi tahunan tetap mencerminkan tren peningkatan tekanan harga di daerah serta menjadi perhatian untuk intervensi yang dapat meredakannya. Pemerintah perlu

bertindak proaktif untuk melakukan pemantauan pasar dan menjaga kestabilan harga melalui program Pasar Murah atau distribusi bahan pokok yang bekerja sama dengan Bulog Sidrap.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Penegendalian Inflasi di Daerah:

1. Terjadinya gejolak harga akibat tingginya permintaan pada saat memasuki saat mendekati puncak musim panen atau hari raya.
2. Terjadinya inflasi gejolak harga berasal dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan rokok, serta perumahan, listrik, gas, dan air.
3. Produktivitas Pangan di pengaruhi oleh Iklim menjadi tantangan yang dihadapi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah Kabupaten Enrekang yaitu dengan melakukan Monitoring/Pemantauan Harga Bahan Pokok di Pasar secara berkala termasuk menjelang hari besar keagamaan Idul Adha 1446 H, Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) jelang HBKN Idul Adha 1446 H, Meningkatkan Hasil Produksi, melakukan pengawasan distribusi barang, Melakukan rapat koordinasi Forkopimda/TPID secara rutin dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evalusi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah khususnya di Kabupaten Enrekang yaitu Dengan meningkatkan hasil Produksi, Faktor cuaca menjadi kendala untuk produksi pada tanaman komoditi Perkebunan yang rentan dan sensitif terhadap perubahan cuaca, mempermudah masuknya barang impor dan menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum dan melakukan pengwasan dan distribusi barang, melakukan sidak pasar atau Operasi Pasar murah agar distributor tidak menahan barang dan penghasil komoditi pasokan, Berkoordinasi dengan Daerah Penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dalam rangka dukungan pengendalian Inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah yaitu terdiri dari Kebijakan Fiskal berkaitan dengan penerimaan APBN yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah Inflasi dengan mengurangi Pengeluaran Pemerintah, meningkatka Tarif pajak serta melakukan Pinjaman. Kebijakan Moneter bertujuan menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Non Fiskal dan Non Moneter dengan meningkatkan hasil Produksi, mempermudah masuknya barang Impor, Perlunya kerjasama pengendalian inflasi di pusat dan daerah. TPID dan TPID harus terus mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit, serta menjadi fasilitator yang baik, untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam upaya pengendalian inflasi, Perlunya pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk mengantisipasi kurangnya persediaan, Meningkatkan Koordinasi antar stakeholder yang lebih

kuat terhadap upaya stabilitas harga dan pemenuhan permintaan barang kebutuhan pokok masyarakat, menstabilkan pendapatan masyarakat dan menetapkan harga maksimum serta melakukan pengawasan dan Distribusi barang yang biasa di lakukan Pemerintah yaitu Menambah hasil Produksi, mempermudah masuknya barang Impor serta menetapkan harga maksimum.